

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peranan pendidikan merupakan hal yang penting dalam memajukan negara. Dengan adanya pendidikan, suatu negara dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkannya, seperti menumbuh kembangkan watak kepribadian bangsa, memajukan kehidupan bangsa, kesejahteraan bangsa, dan mencetak manusia –manusia yang terdidik sehingga dapat memajukan bangsa. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam memajukan sebuah pendidikan yakni pengelolaan pendidikan yang saat ini harus dihadapi Indonesia semakin berat dan kompleks. Salah satu tantangan yang penting untuk dihadapi sekolah yaitu bagaimana mengelola sumber daya yang ada di sekolah agar dapat meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan mutu pembelajaran pada khususnya.

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 (24) menjelaskan bahwa mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Yang mengartikan bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan, mutu pendidikan menjadi sangat penting untuk dipertanggungjawabkan dan harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa standar ini merupakan kriteria minimum yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Tujuannya tak lain adalah sebagai upaya untuk menciptakan mutu melalui penjaminan mutu atas standar yang ada,

**Veranica Dwi Murwani, 2018**

*PENGARUH KESEHATAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TERHADAP MUTU SEKOLAH DI SMP SE-KOTA CIMAHI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang pada akhirnya akan berimplikasi pada kepuasan pelanggan pendidikan.

Dzaujak ahkad (Umiarso & Imam Gajali, 2010, hlm. 124) mengemukakan bahwa:

Mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/ standar yang berlaku.

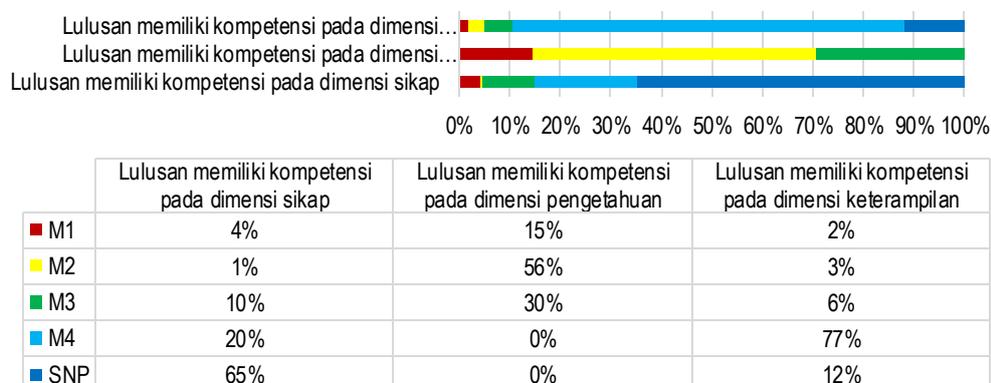
Pelaksanaan mutu pendidikan dasar dan menengah mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh sekolah dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Sarana dan Prasarana; dan (8) Standar Pembiayaan. Hal ini diperkuat dengan data yang diperoleh dari (Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Analisis Kondisi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017). Berdasarkan data Analisis Kondisi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hasil analisis pada jenjang SMP dapat menggambarkan bahwa dalam hal Standar Kompetensi Lulusan harus memiliki tiga ranah, yaitu lulusan harus memiliki kompetensi pada dimensi sikap, lulusan harus memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan dan lulusan harus memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan. Permasalahan dalam standar kompetensi lulusan adalah lulusan dari setiap jenjang pendidikan di

**Veranica Dwi Murwani, 2018**

*PENGARUH KESEHATAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TERHADAP MUTU SEKOLAH DI SMP SE-KOTA CIMAHI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Indonesia kurang memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual



dan metakognitif. Sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini:

**Gambar 1.1 Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang SMP per Indikator**

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Analisis Kondisi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017, hlm. 36.

Nilai capaian indikator lulusan yang memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 2 dan merupakan indikator dengan capaian terkecil dibanding dengan indikator lainnya. Skala nasional untuk standar kompetensi lulusan pada sekolah jenjang SMP baik dengan nilai capaian sebesar 4,96 dan termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 3. Belum terdapat sekolah pada jenjang SMP yang berhasil mencapai SNP secara sempurna untuk standar kompetensi lulusan. Indonesia memiliki nilai capaian standar kompetensi lulusan termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 3 sampai menuju SNP tingkat 4.

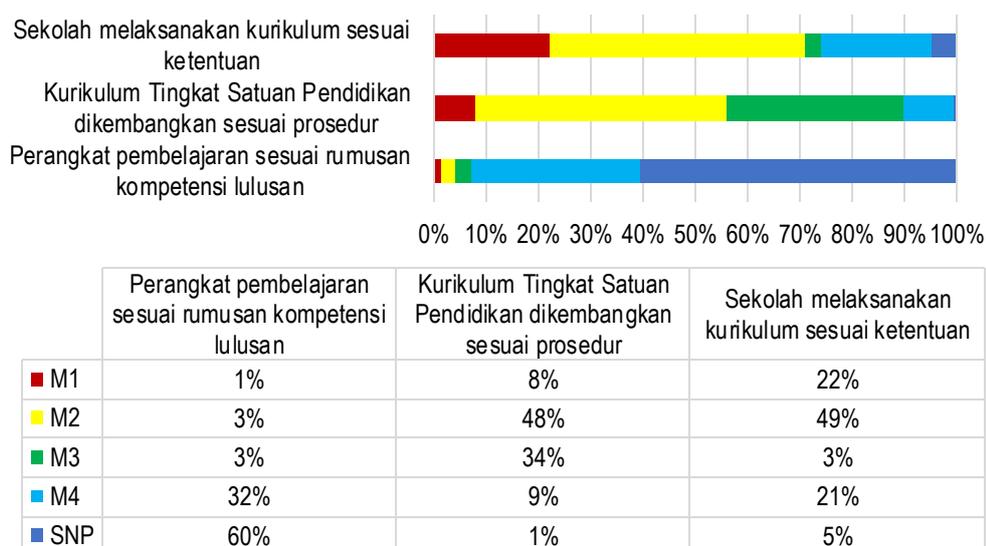
Sedangkan Standar isi yang harus dipenuhi yaitu terkait dengan perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan, KTSP dikembangkan sesuai prosedur dan sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan. Secara keseluruhan, capaian standar isi pada jenjang SMP adalah baik dengan nilai sebesar 4,62 dan termasuk dalam kategori

Veranica Dwi Murwani, 2018

*PENGARUH KESEHATAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TERHADAP MUTU SEKOLAH DI SMP SE-KOTA CIMAHI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menuju SNP tingkat 3. Jumlah sebaran sekolah yang menerapkan standar isi sesuai SNP sebanyak 84 SMP (0,22%). Permasalahan yang muncul dalam standar isi adalah sekolah belum mampu melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan dan KTSP belum dikembangkan sesuai prosedur. Rata-rata sekolah yang melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan termasuk



dalam kategori menuju SNP tingkat 2 sedangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai di prosedur hanya dilaksanakan oleh 49% sekolah jenjang SMP di Indonesia. Kondisi ini dapat di telusuri dalam gambar- gambar berikut ini:

**Gambar 1.2 Capaian Standar Isi Jenjang SMP per Indikator**

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Analisis Kondisi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017, hlm. 38.

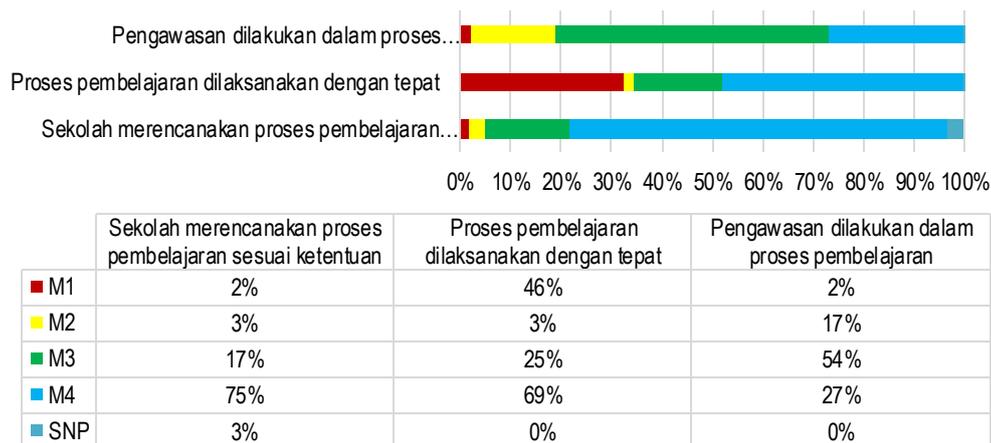
Penilaian standar proses mencerminkan keseluruhan proses pembelajaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Sesuai dengan keseluruhan proses tersebut maka standar proses diukur berdasarkan tiga indikator, yaitu perencanaan proses pembelajaran; proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat; dan pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran. Secara keseluruhan nilai capaian

Veranica Dwi Murwani, 2018

PENGARUH KESEHATAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TERHADAP MUTU SEKOLAH DI SMP SE-KOTA CIMAHI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemenuhan standar proses pada jenjang SMP cukup baik dengan rata-rata nilai capaian sebesar 4,94 dan termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 3. Sekolah yang telah merencanakan proses pembelajaran sesuai SNP terdapat sekitar 75%. Capaian sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan tepat rata-rata termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 4.



**Gambar 1.3 Capaian Standar Proses Jenjang SMP per Indikator**

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Analisis Kondisi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017, hlm. 40.

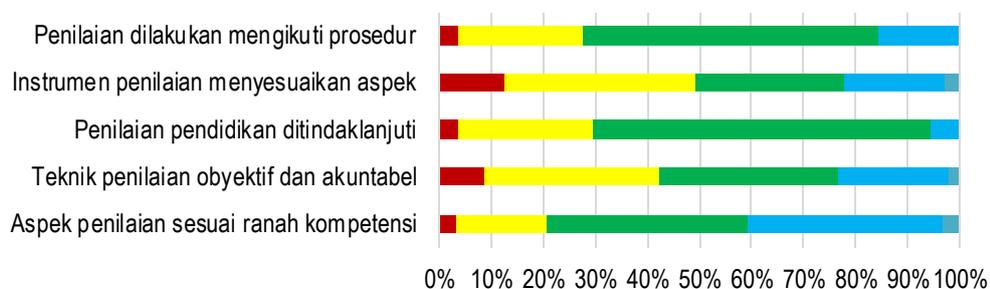
Standar penilaian bertujuan untuk mengetahui ketepatan dan keobyektifan metode yang digunakan untuk melakukan penilaian dan untuk mengetahui tindak lanjut dari penilaian yang dilakukan. Lima indikator pembentuk standar penilaian yaitu penilaian sesuai ranah kompetensi; teknik penilaian obyektif dan akuntabel; penilaian pendidikan ditindaklanjuti; instrumen penilaian menyesuaikan aspek; dan penilaian dilakukan mengikuti prosedur. Capaian nilai pemenuhan standar penilaian memiliki nilai yang cukup baik yaitu 4,05 dan termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 3. Namun, belum terdapat SMP yang mencapai SNP.

Veranica Dwi Murwani, 2018

PENGARUH KESEHATAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TERHADAP MUTU SEKOLAH DI SMP SE-KOTA CIMAHI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kelima indikator pembentuk nilai standar penilaian memiliki nilai capaian yang hampir sama dan termasuk pada kategori menuju SNP tingkat 3 kecuali indikator terkait instrumen penilaian termasuk dalam kategori



	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur
■ M1	3%	9%	4%	13%	4%
■ M2	17%	34%	26%	36%	24%
■ M3	39%	34%	65%	29%	57%
■ M4	37%	21%	5%	19%	16%
■ SNP	3%	2%	0%	3%	0%

menuju SNP tingkat 2.

#### Gambar 1.4 Capaian Standar Penilaian Pendidikan Jenjang SMP per Indikator

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Analisis Kondisi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017, hlm. 43.

Berdasarkan data diatas, permasalahan – permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan keempat aspek SNP diatas dialami oleh setiap satuan pendidikan diberbagai kota/ kabupaten. Dalam upaya untuk mencapai SNP, sekolah menghadapi beragam permasalahan yang harus dihadapi. Permasalahan – permasalahan tersebut akan terus berkembang sehingga perlunya upaya untuk memperbaiki agar mutu pendidikan yang direncanakan dapat terwujud secara optimal. Demikian halnya dengan Kota Cimahi, pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP/ sederajat sebesar

Veranica Dwi Murwani, 2018

PENGARUH KESEHATAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TERHADAP MUTU SEKOLAH DI SMP SE-KOTA CIMAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

76,97% sedangkan untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Cimahi pada tahun 2005 tingkat SMP/ sederajat sebesar 86,34%. (Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJDM) Kota Cimahi Tahun 2005-2025, Bab II hlm.4-5). Namun, pada tahun 2011 Kota Cimahi mendapatkan peningkatan yang signifikan pada angka kelulusan SMP/MTs sebesar 99,84% dan angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA, SMK mencapai 111,00%. (Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJDM) Kota Cimahi Tahun 2012-2017, Bab II hlm.24)

Sedangkan untuk jenjang pendidikan dasar, data pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: APM SD/MI mencapai 92.01% dan APM SMP/MTs. mencapai 69.84%. Penyebab kurang optimalnya APK SD/MI dan SMP/MTs Kota Cimahi seperti pada data di atas banyak AUS (7-12 dan 13 -15 tahun) yang bersekolah di luar wilayah Kota Cimahi, sedangkan untuk APM dikarenakan selain AUS yang bersekolah di luar Kota Cimahi juga ada sebagian AUS siswa SD/MI yang sudah bersekolah di SMP/MTS dan AUS SMP/MTS yang sudah bersekolah di SMA/MA/SMK. Untuk Angka Putus Sekolah (APtS) tahun 2011, pada jenjang SD/MI APtS sebesar 0,13%, AptS SMP/MTs sebesar 0,23%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs lebih tinggi daripada angka putus sekolah pada jenjang SD/MI. (Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJDM) Kota Cimahi Tahun 2012-2017, Bab II hlm.24-25)

Belum optimalnya aksesibilitas dan kesempatan memperoleh pendidikan oleh sebagian masyarakat karena faktor ekonomi dimana hal ini merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah maupun karena harus bekerja (Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJDM) Kota Cimahi Tahun 2012-2017, Bab IV hlm.3). Hal tersebut

**Veranica Dwi Murwani, 2018**

*PENGARUH KESEHATAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TERHADAP MUTU SEKOLAH DI SMP SE-KOTA CIMAHI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menjadi salah satu penyebab terhambatnya pencapaian APK, berdampak pada kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya. Kualitas lulusan pendidikan belum merata dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (dunia kerja). Hal ini dikarenakan fasilitas, sumber dan media pembelajaran khususnya untuk jenjang pendidikan menengah belum tersedia secara merata, juga ketersediaan pendidik yang mengajar pada bidang-bidang studi tertentu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Lulusan pendidikan menengah cenderung memilih bekerja daripada menciptakan pekerjaan.

Secara umum penyebab masalah mutu pendidikan telah dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya: Soedijarto (1991, hlm. 56), bahwa rendahnya mutu atau kualitas pendidikan di samping disebabkan oleh karena pemberian peranan yang kurang proporsional terhadap sekolah, kurang memadainya perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sistem kurikulum, dan penggunaan prestasi hasil belajar secara kognitif sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pendidikan, juga disebabkan karena sistem evaluasi tidak secara berencana didudukkan sebagai alat pendidikan dan bagian terpadu dari sistem kurikulum. Edward Sallis (1984) dalam *Total Quality Management in Education* menyebutkan, kondisi yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan dapat berasal dari berbagai macam sumber, yaitu miskinnya perancangan kurikulum, ketidakcocokan pengelolaan gedung, lingkungan kerja yang tidak kondusif, ketidaksesuaian sistem dan prosedur (manajemen), tidak cukupnya jam pelajaran, kurangnya sumber daya, dan pengadaan staf (Syafaruddin, 2002: 14).

Sedangkan menurut laporan Bank Dunia dalam Mulyasa (2002: 12-13), terdapat empat faktor yang diidentifikasi menjadi kendala mutu atau mutu pendidikan di Indonesia, yaitu: (1) Kompleksitas pengorganisasian pendidikan antara Depdiknas (bertanggung jawab dalam hal materi pendidikan, evaluasi buku teks dan kelayakan bahan-bahan ajar)

Veranica Dwi Murwani, 2018

PENGARUH KESEHATAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TERHADAP MUTU SEKOLAH DI SMP SE-KOTA CIMAHI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan Depagri dalam bidang (ketenagaan, sumber daya material, dan sumber daya lainnya). Selain itu, Departemen Agama bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi sekolah-sekolah keagamaan negeri maupun swasta. Dualisme ini berakibat fatal karena rancunya pembagian tanggung jawab dan peranan manajerial, keterlambatan dan terpilahnya sistem pembiayaan, serta perebutan kewenangan atas guru; (2) Praktik manajemen yang sentralistik pada tingkat SLTP. Pembiayaan dan perencanaan oleh pemerintah pusat yang melibatkan banyak departemen. Hal ini menghambat pencapaian tujuan wajib belajar pendidikan dasar; (3) Praktik penganggaran yang terpecah dan kaku. Kompleksitas organisasi yang menyiapkan anggaran pembangunan menjadi rumitnya pengelolaan pendidikan. Bappenas, Depdiknas, dan Depagri, termasuk Depag, dalam menyiapkan anggaran pendidikan. Akibatnya, hal ini menimbulkan dampak negatif, yaitu tidak adanya tanggung jawab yang jelas antar unit, tidak ada evaluasi reguler terhadap kebutuhan riil, dan tidak ada jaminan dana yang dialokasikan secara benar dan merata; (4) Manajemen sekolah yang tidak efektif. Sebagai pelaku utama, kepala sekolah banyak yang kurang mampu melakukan peningkatan mutu sekolahnya karena tidak dilengkapi dengan kemampuan kepemimpinan dan manajerial yang baik. Pelatihan yang kurang dan rekrutmen kepala sekolah yang belum didasarkan atas kemampuan memimpin dan profesionalitas.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, nampak bahwa faktor kemampuan manajemen sekolah menjadi hambatan terbesar tercapainya mutu pendidikan disekolah. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Hasibuan, 2004 hlm.54) dalam manajemen pendidikan 1 hlm.2. Manajemen merupakan suatu instrumen yang penting, baik itu bagi organisasi besar, menengah maupun kecil. Manajemen sangat dibutuhkan oleh setiap

Veranica Dwi Murwani, 2018

*PENGARUH KESEHATAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TERHADAP MUTU SEKOLAH DI SMP SE-KOTA CIMAH*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

organisasi karena hanya dengan manajemen yang baik, organisasi akan berkembang, berhasil dan mencapai kemajuan. Proses manajemen meliputi usaha perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/ pengimplementasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan potensi yang ada secara efektif dan efisien. (Hasibuan, 2005 hlm.37) dalam manajemen pendidikan 1 hlm.17.

Sejalan dengan pemikiran tersebut pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti dirilis di [www.cimahikota.go.id/skpd/detail/61](http://www.cimahikota.go.id/skpd/detail/61), memberikan penekanan pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun khususnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dengan beberapa program unggulan, seperti diantaranya: (1) Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik; (2) Pelatihan Penyusunan kurikulum; (3) Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar; (4) Revitalisasi MKG SD dan MGMP SMP; (5) Pembinaan Komite Sekolah; dan (6) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan.

Manajemen sekolah sebagai tatalaksana keberadaan sebuah organisasi yang hidup membutuhkan suatu tatanan yang matang dalam pelaksanaannya. Namun dalam praktik manajemen pendidikan, data dan informasi hasil riset menunjukkan bahwa manajemen sekolah saat ini mengalami masalah serius dilihat dari proses penyelenggaraan dan hasil pendidikan (Penelitian Bappenas, 2009; Penelitian Wayan Koster, 2011, Penelitian Cipi Triatna, 2014). Berbagai studi ini menunjukkan bahwa kondisi manajemen sekolah mengalami banyak masalah, tetapi belum disadari secara langsung oleh kepala sekolah, guru, pengawas yang membina sekolah tersebut, dan berbagai pihak terkait para penyusun kebijakan dan program di tingkat dinas pendidikan kabupaten/ kota/ provinsi/ kementerian. Hal ini mengindikasikan bahwa tahap implementasi

**Veranica Dwi Murwani, 2018**

*PENGARUH KESEHATAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TERHADAP MUTU SEKOLAH DI SMP SE-KOTA CIMAHI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

program sebagai salah satu tahapan dalam proses manajemen sekolah, memerlukan upaya serius dari kepala sekolah dan pemangku kepentingan sehingga apa yang sudah direncanakan dapat diimplementasikan sesuai dengan rencana atau dikembangkan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang dihadapi. Pelaksanaan program kerja secara baik/ sehat diduga akan memiliki dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: “Pengaruh Kesehatan Pelaksanaan Program Kerja Terhadap Mutu Sekolah di SMP Se-Kota Cimahi (Studi Pada Sekolah Menengah Pertama Se-Kota Cimahi).”

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan suatu permasalahan yang akan dibahas dan diteliti yakni:

1. Bagaimana kondisi kesehatan pelaksanaan program kerja sekolah di SMP se- Kota Cimahi?
2. Bagaimanakah kondisi mutu sekolah di SMP se- Kota Cimahi?
3. Seberapa besar pengaruh kesehatan pelaksanaan program kerja terhadap mutu sekolah di SMP se-Kota Cimahi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran atau harapan yang akan dicapai dengan penyelenggaraan penelitian ini. Dengan kata lain bahwa

Veranica Dwi Murwani, 2018

*PENGARUH KESEHATAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TERHADAP MUTU SEKOLAH DI SMP SE-KOTA CIMAHI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tujuan penelitian merupakan arah yang akan dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang diharapkan terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

#### 1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai Kesehatan Pelaksanaan Program Kerja terhadap Mutu Sekolah di SMP Se-Kota Cimahi

#### 2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menggambarkan kondisi kesehatan pelaksanaan program kerja sekolah di SMP se- Kota Cimahi.
- b. Untuk menggambarkan kondisi mutu sekolah di SMP se- Kota Cimahi.
- c. Untuk mengetahui besaran pengaruh kesehatan pelaksanaan program kerja terhadap mutu sekolah di SMP se-Kota Cimahi

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pendalaman yang lebih luas mengenai kajian keilmuan terkait dengan mutu sekolah yang dipengaruhi oleh kesehatan pelaksanaan program kerja sekolah.

#### 2. Manfaat praktis

##### a. Bagi penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, pengalaman dan sebagai bahan kajian dalam pengembangan

keilmuan mengenai mutu sekolah dan kesehatan pelaksanaan program kerja sekolah.

b. Bagi pihak sekolah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak sekolah khususnya pada SMP se-Kota Cimahi mengenai mutu sekolah dan kesehatan pelaksanaan program kerja sekolah.

c. Bagi program studi Administrasi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk memperoleh konsep baru mengenai mutu sekolah dan kesehatan pelaksanaan program kerja sekolah.

## 1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam kerangka penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi disusun berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun Akademik 2016 mengenai struktur organisasi skripsi dalam mempermudah dan mengetahui garis besar dari isi skripsi setiap babnya, adapun struktur organisasi skripsi ini adalah:

- BAB I Pendahuluan yang menjadi bab perkenalan. Struktur bab pendahuluan adalah latar belakang yang memaparkan konteks penelitian yang dilakukan; rumusan masalah; tujuan umum dan khusus dari penelitian; manfaat/signifikansi penelitian yang memberikan gambaran nilai lebih yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan; serta struktur organisasi yang berisikan tentang isi dari setiap bab skripsi.
- BAB II Kajian Pustaka berisikan teori-teori dalam skripsi memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian; penelitian

Veranica Dwi Murwani, 2018

*PENGARUH KESEHATAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TERHADAP MUTU SEKOLAH DI SMP SE-KOTA CIMAH*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terdahulu dalam konteks yang sama; serta kerangka pikir dari penelitian.

- BAB III Metode Penelitian bagian yang bersifat procedural yang berisikan desain penelitian; partisipan dan tempat penelitian; pengumpulan data yang menjelaskan secara rinci jenis data yang diperlukan dan instrument apa yang digunakan dan tahapan-tahapan teknik pengumpulan datanya; dan analisis data yang menjelaskan secara rinci dan jelas langkah- langkah yang ditempuh setelah data berhasil dikumpulkan.
- BAB IV Temuan dan Pembahasan yang menyampaikan dua hal utamma, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan perumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.
- BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.